

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pedoman pelaksanaan kegiatan dalam suatu pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yaitu berupa anggaran yang disusun dan telah direncanakan untuk dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Anggaran adalah suatu elemen yang sangat penting bagi sebuah pemerintah daerah (Pemda) dalam mewujudkan suatu kebutuhan masyarakat warga negara (Sari, dkk 2019).

Adapun fenomena yang terdapat di Negara Indonesia dewasa ini bahwasannya pemerintah daerah belum bisa menempatkan alokasi anggaran secara optimal sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat luas. Anggaran pemerintah dalam penggunaannya masih ada yang dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, sehingga pengalokasian anggaran belum dilakukan secara merata (Kusuma Negara, dkk 2018).

Islam sendiri sudah mengajarkan bahwa harta negara/daerah harus diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat secara luas terutama masyarakat yang mengalami kekurangan. Allah pun sudah menetapkan hukuman bagi orang-orang yang tidak menaatinya yang dalam hal ini anggaran sangat diperlukan bagi kepentingan umum, apabila digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi, maka orang tersebut telah melakukan perbuatan yang dzalim. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 07 yang berbunyi:

" مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ "

Artinya : “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya (Al Hasyr Ayat 7)”.

**Tabel 1.1**  
 “Kabupaten Sleman  
 Satuan Kerja Perangkat Daerah  
 Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah”  
 Tahun 2014-2018 (dalam milyar)

Tahun	Anggaran Pendapatan Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	%
2014	1.969	2.076	105,46
2015	2.262	2.294	101,43
2016	2.183	2.329	106,66
2017	2.547	2.615	102,67
2018	2.641	2.712	102,70

Sumber: bkad.slemankab.go.id

Berdasarkan data pada tabel di atas bahwa diantara anggaran daerah dengan realisasinya terdapat perbedaan nilai. Biasanya anggaran pendapatan daerah akan lebih besar daripada nilai realisasinya. Hal itu

menandakan bahwa kinerja SKPD Kabupaten Sleman kurang pelaksanaan yang optimal dalam menyusun dan merencanakan anggaran daerahnya. Berdasarkan penjelasan tersebut dikatakan terdapat senjangan anggaran.

Priyetno (2018) pernah berpendapat bahwa senjangan anggaran sebagai suatu tindakan dimana melebihkan kemampuan produktif dengan mengestimasi pendapatan lebih rendah dan biaya lebih besar ketika diberikan kesempatan untuk memilih standar kerja sehingga bisa meningkatkan kinerjanya (Priyetno, 2018). Menurut Irfan, dkk (2016), terjadinya senjangan anggaran dikarenakan penentuan pendapatan yang terlampau rendah dengan estimasi biaya yang terlampau tinggi. Hal tersebut memberikan dampak yang buruk bagi organisasi khususnya bidang sektor publik dengan terjadinya *mistake* pada pengalokasian sumber daya dan kurangnya evaluasi kinerja terhadap unit yang ada dibawah pertanggungjawabannya.

Banyak hal yang dapat mengakibatkan senjangan anggaran dalam suatu organisasi, diantaranya adalah tekanan anggaran. Tekanan anggaran adalah desakan dari atasan kepada bawahan agar seorang bawahan merealisasikan anggaran sesuai dengan apa yang telah dibuat dengan estimasi terbaiknya (Evindiana, dkk 2018). Dalam suatu organisasi, adanya tekanan anggaran dapat berpengaruh terhadap perilaku etis seseorang dalam mengambil keputusan, seperti kejujuran dan mengutamakan kepentingan tujuan organisasi daripada mementingkan diri sendiri (Pamungkas, dkk 2014). Ketika penentuan nilai kinerja bawahan diukur berdasarkan anggaran

yang telah disusun, maka bawahan akan berupaya semaksimal mungkin agar anggaran tersebut tercapai sehingga memperoleh imbalan yang menguntungkan, akan tetapi apabila target tidak tercapai maka akan mendapat hukuman, untuk itu seorang manajer akan melakukan segala upaya agar tidak mendapatkan hukuman.

Tekanan anggaran terhadap senjangan anggaran menurut peneliti terdahulu Sutanaya dan Sari (2018) dengan Ngol *et.al* (2017), berpengaruh positif. Dapat dikatakan bahwa senjangan anggaran terjadi apabila kinerja karyawan diukur dengan menggunakan tingkat tercapainya anggaran tersebut sehingga dapat mendorong bawahan untuk melakukan senjangan anggaran. Sedangkan penelitian Irfan, dkk (2016) dengan Chong dan Strauss (2017) yang menyatakan bahwa tekanan anggaran berpengaruh negatif signifikan.

Dalam suatu organisasi diperlukan komunikasi sesama pihak yang saling memiliki kaitan sehingga informasi antara atasan dan bawahan mempunyai proporsi yang sama agar tidak menimbulkan asimetri informasi. Menurut Sari, dkk (2019), asimetri informasi dapat diartikan sebagai suatu kondisi aktual ketika atasan kurang memiliki informasi dan data yang mencukupi berkaitan dengan kinerja bawahannya. Dengan adanya asimetri informasi pihak yang kurang selaras dengan tujuan organisasi dapat menyalahgunakan kesempatan yang diberikan. Seperti pihak yang memiliki kesempatan dalam proses penyusunan anggaran dan kemudian kesempatan tersebut disalahgunakan. Hal ini disebabkan karena pihak bawahan bisa

memberikan data dan informasi yang tidak sesuai kepada atasan dengan membuat anggaran serelatif mungkin agar mudah dalam pencapaiannya dengan membuat laporan anggaran dibawah kinerja yang diharapkan, hal tersebut dapat membuat senjangan anggaran terjadi di sebuah instansi.

Asimetri informasi pada senjangan anggaran menurut peneliti terdahulu yaitu Sari, dkk (2019) dan Wardani (2014) mendapatkan hasil bahwa asimetri informasi mempunyai pengaruh yang signifikan pada senjangan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa senjangan anggaran akan lebih meningkat apabila terdapat informasi yang asimetris dalam suatu organisasi, karena informasi yang asimetris pelaksana anggaran dapat terdorong untuk melakukan senjangan anggaran. Sedangkan penelitian Irfan, dkk (2016) mendapatkan hasil asimetri informasi berpengaruh yang negatif dan signifikan pada hubungannya antara partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran.

Guna meminimalisir terjadinya tindak negatif seperti senjangan anggaran, penerapan sistem partisipasi anggaran (*budgetary participation*) perlu dilakukan pada pemerintah daerah, dengan melibatkan atasan secara langsung untuk turut serta berpartisipasi pada saat proses pengkajian ulang anggaran, pengesahan anggaran, dan turut memantau secara langsung di lapangan mengenai pelaksanaan anggaran tersebut, sehingga realisasi anggaran bisa tercapai secara maksimal. Partisipasi bawahan yang terlampau besar dapat mengakibatkan kesempatan yang besar pula bagi pelaksana anggaran dalam melakukan senjangan anggaran begitu juga

sebaliknya, apabila partisipasi bawahan lebih sedikit, maka tingkat kesempatan dalam melakukan senjangan anggaran akan semakin kecil. Untuk itu, dibutuhkan sebuah batasan bagi bawahan dalam berpartisipasi dimana pelaksana anggaran menyusun anggaran sesuai dengan proporsi dan rencana strategi yang sudah ditetapkan sehingga diharapkan dapat mengurangi munculnya senjangan anggaran (Basyir, 2016).

Penelitian terdahulu yaitu Basyir (2016) dan Sutayana, dkk (2016), menemukan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap senjangan anggaran. Semakin tinggi partisipasi anggaran maka akan mengakibatkan senjangan anggaran. Namun Ngol *et.al* (2017) mendapatkan hasil partisipasi anggaran tidak berpengaruh pada senjangan anggaran.

Selain dalam hal partisipasi anggaran, seorang karyawan juga harus berkomitmen tinggi dalam mencapai tujuan dan sasaran kerja yang sudah ditetapkan sebelumnya. Komitmen organisasi yang tinggi merupakan dorongan dari masing-masing individu yang ikut andil pada saat proses pelaksanaan program kerja pemerintah daerah tersebut. Apabila komitmen organisasi yang terdapat di suatu pemerintah daerah tinggi, maka setiap individu pemerintahan juga akan berusaha semaksimal mungkin dalam mewujudkan program yang sudah direncanakan. Hal tersebut yang diharapkan dapat membuat minimal terjadinya sesuatu hal negatif dalam pemerintah daerah seperti senjangan anggaran (Rosita, 2017).

Komitmen organisasi pada senjangan anggaran menurut peneliti terdahulu Irfan, dkk (2016) dengan Sari, dkk (2019), berpengaruh signifikan. Berarti apabila tingkat komitmen organisasi yang dimiliki individu rendah maka bisa mengakibatkan senjangan anggaran yang tinggi. Sedangkan pada penelitian Saputra dan Putra (2017) menyatakan komitmen organisasi tidak memoderasi pengaruh partisipasi anggaran pada senjangan anggaran.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Irfan, dkk (2016) dengan judul “Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran dengan Asimetri Informasi, Penekanan Anggaran dan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi”. Hasil uji pada variabel asimetri informasi dan variabel tekanan anggaran menyatakan bukti bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh negatif yang signifikan pada senjangan anggaran. Hal ini membuktikan jikalau kondisi asimetri informasi dan tekanan anggaran dalam pemerintah daerah bisa menurunkan terjadinya senjangan anggaran, sehingga variabel asimetri informasi dan variabel tekanan anggaran bukan termasuk variabel pemoderasi.

Namun, hal pembeda pada penelitian kali ini adalah, jika penelitian sebelumnya variabel tekanan anggaran dan variabel asimetri informasi digunakan sebagai variabel pemoderasi, penelitian kali ini variabel tekanan anggaran dan variabel asimetri informasi digunakan sebagai variabel independen.

Melihat fenomena yang sudah dipaparkan, hasil penelitian terdahulu serta data dari APBD Kabupaten Sleman, maka peneliti termotivasi untuk mengkaji ulang dan mereplikasi penelitian tersebut dengan judul: **“PENGARUH TEKANAN ANGGARAN, ASIMETRI INFORMASI DAN PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP SENJANGAN ANGGARAN DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman)”**.

#### **B. Rumusan Masalah Penelitian**

- a. Apakah Tekanan Anggaran berpengaruh positif terhadap Senjangan Anggaran?
- b. Apakah Asimetri Informasi berpengaruh positif terhadap Senjangan Anggaran?
- c. Apakah Partisipasi Anggaran berpengaruh positif terhadap Senjangan Anggaran?
- d. Apakah Komitmen Organisasi memoderasi hubungan antara Partisipasi Anggaran dengan Senjangan Anggaran?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Menguji Tekanan Anggaran berpengaruh positif terhadap Senjangan Anggaran.
- b. Menguji Asimetri Informasi berpengaruh positif terhadap Senjangan Anggaran.



- c. Menguji Partisipasi Anggaran berpengaruh positif terhadap Senjangan Anggaran.
- d. Menguji Komitmen Organisasi terhadap hubungan antara Partisipasi Anggaran dengan Senjangan Anggaran.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian pengetahuan dan wawasan di bidang Akuntansi, terutama pada Sektor Publik.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menambah pengetahuan yang berkenaan dengan anggaran terkhusus bagi peneliti yang ingin mengadakan penelitian dalam bidang anggaran pada Pemerintahan.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Semoga hasil penelitian ini bisa menambah informasi dan pengetahuan pada ranah pendidikan, yaitu pada jenjang Perguruan Tinggi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi rujukan bagi para peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai anggaran yang terdapat di Pemerintahan.
- b. Semoga hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat serta menjadi media informasi untuk masyarakat luas agar lebih memahami mengenai senjangan anggaran sehingga bisa berperan sebagai

pengawas eksternal yang ikut memantau terhadap anggaran pemerintahan.

### **3. Manfaat Kebijakan**

- a. Semoga hasil penelitian ini bisa membantu organisasi pemerintah daerah Kabupaten Sleman agar lebih memahami apa saja yang berdampak pada penyebab terjadinya selisihan anggaran dan dapat membantu menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperbaiki kinerjanya, sehingga kedepannya kinerja SKPD bisa berjalan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kerja dengan lancar sesuai dengan visi dan misi.